

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PARIWISATA TANGGUH BENCANA DI KAWASAN WISATA PANTAI KECAMATAN KALIANDA

2.1 Pariwisata

2.1.1 Sejarah Pariwisata

Sejarah perjalanan dalam perkembangannya diartikan sebagai perjalanan wisata. Sejak dahulu sekumpulan orang yang berani, tabah, dan tidak mengenal rasa takut menempuh perjalanan jauh untuk suatu tujuan yang ingin mereka capai. Ada berbagai motivasi yang mendorong keberanian dan tekad mereka, yaitu kebutuhan praktis dalam politik dan perdagangan, perasaan ingin tahu, serta dorongan keagamaan. Sekitar pertengahan abad XIX dengan adanya penemuan kereta api, menyebabkan munculnya revolusi dalam dunia perjalanan, penemuan ini menjadikan pariwisata berkembang lebih cepat dibandingkan dari waktu sebelumnya. Selanjutnya pada abad XX pariwisata berubah ciri-cirinya menjadi kegiatan sosial dan gejala umum, paling tidak terjadi di negara-negara yang ekonominya sudah maju (Buku Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, 1987).

2.1.2 Konsep dan Definisi Pariwisata

Pariwisata menurut bahasa Sangsakerta, yaitu memiliki dua arti dimana “pari” berarti banyak atau berputar-putar dan “wisata” berarti perjalanan atau bepergian, sehingga dari kedua hal tersebut pariwisata dapat dikatakan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali (Isdarmanto, 2017). Terdapat tiga elemen utama dalam kegiatan wisata (Ismayanti, 2010), yaitu:

1. Wisatawan

Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata, dimana kegiatan wisata merupakan suatu pengalaman untuk menikmati, mengantisipasi, serta mengingatkan masa-masa yang telah dilakukan dalam sebuah kehidupan.

2. Elemen Geografi

Pergerakan wisatawan memiliki tiga kategori dalam area geografi, seperti berikut ini.



Sumber : Ismayanti, 2010

GAMBAR 2.1
Sistem Dasar Pariwisata

a. Daerah Asal Wisatawan (DAW)

Tempat bermula wisatawan sebelum melakukan perjalanan untuk pergi ketempat tujuan wisata.

b. Daerah Transit (DT)

Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah tujuan wisata, akan tetapi wisatawan dapat berhenti untuk beristirahat sejenak di daerah transit sebelum mencapai daerah tujuan.

c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)

Tempat tujuan/ akhir wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata dari tempat asalnya, daerah tujuan pariwisata diperlukan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat untuk menarik minat wisatawan datang kembali.

3. Industri Pariwisata

Industri pariwisata merupakan industri yang menyediakan sebuah jasa, daya tarik, dan sarana wisata yang tersebar di daerah asal, daerah transit, serta daerah tujuan wisata.

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah kumpulan dari berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan tersedianya berbagai fasilitas serta layanan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan wisatawan saat melakukan kegiatan wisata. Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dan bertujuan untuk berrekreasi atau memiliki suatu kepentingan sehingga keinginannya dapat terpenuhi. Selain itu pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk rekreasi, lalu kembali ke tempat asalnya. (Saleh Bachruddin, 2019).

2.1.3 Pariwisata Pesisir dan Pantai

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang saling berhubungan, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota (Menteri Kelautan dan Pariwisata, No 10 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, 2002). Kawasan pesisir merupakan kawasan peralihan antara darat dan laut yang ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh hempasan percikan air pasang-surut, sedangkan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Kawasan pesisir yang ke arah laut masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia (Pramudji, 2002). Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, wilayah pesisir banyak dimanfaatkan dan memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir dan juga sebagai penghasil pendapatan daerah yang sangat penting, salah satu potensi kawasan pesisir yaitu sebagai pengembangan kawasan pariwisata (Fauzy, 2009 dalam Dirgayusa, 2015).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap cukup prospektif dalam peningkatan ekonomi, sektor pariwisata tidak hanya sekadar mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan, tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan, selain itu pariwisata memberikan dampak positif, antara lain (Isdarmanto, 2017):

- a) Dapat menciptakan kesempatan berusaha.
- b) Dapat meningkatkan kesempatan kerja.
- c) Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat..
- d) Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah.
- e) Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB).
- f) Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata maupun sektor ekonomi lainnya.

Pembangunan kepariwisataan kawasan pesisir dan bahari pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat diseluruh kawasan perairan Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya untuk pengembangan wisata bahari di kawasan pesisir antara lain adalah karena disebabkan oleh aktifitas manusia, pencemaran dan bencana alam:

- a) Aktifitas manusia

Kegiatan eksploitasi sumberdaya alam laut, baik sumberdaya hayati maupun non hayati yang berlebihan dan tidak memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya alam, sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan pesisir, bahkan dapat mengakibatkan kepunahan biota laut

- b) Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan di kawasan pesisir disebabkan oleh limbah industri, limbah pemukiman, limbah pertambangan, bocoran pipa minyak, limbah pelayaran, tumpahan kecelakaan kapal tanker, balast kapal tanker, limbah pertanian, sedimentasi akibat penggundulan hutan dan juga dari limbah perikanan budidaya.

- c) Bencana alam

Bencana alam yang sering terjadi di kawasan pesisir antara lain adalah banjir sebagai akibat pengundulan hutan, gempa bumi dan gelombang pasang/tsunami.

Dalam rangka untuk mengantisipasi dan menanggulangi adanya musibah bencana alam yang akan terjadi di kawasan pesisir, perlu dilakukan upaya komprehensif yaitu meliputi pembuatan prasarana, sarana pengendalian serta peraturan, dan pelaksanaannya harus melibatkan instansi terkait. Kawasan pesisir yang rawan terhadap bencana alam gelombang pasang tsunami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah membangun rumah di kawasan pantai yang aman dari jangkauan tsunami; mengembangkan perlindungan alami yaitu dengan cara penanaman mangrove untuk membuat green-belt; serta perlu dilakukan penyuluhan tentang bahaya gelombang pasang tsunami dan cara-cara penyelamatannya (Pramudji, 2002).

2.2 Bencana Alam

Menurut Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Bencana adalah gangguan yang serius dari berfungsinya suatu masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap lingkungan, material dan manusia, yang melebihi kemampuan masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangnya dengan hanya menggunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. Bencana alam merupakan suatu bencana yang disebabkan karena sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan angin topan. Bencana non alam merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam seperti bencana gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror (Undang-Undang RI tentang Penanggulangan Bencana No. 24, 2007).

Menurut Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2006 Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim maupun faktor-faktor lain seperti keragaman sosial, budaya dan politik. Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (*natural disaster*) maupun oleh ulah manusia (*man-made disaster*), faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain:

- a) Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena faktor manusia (*man-made hazards*) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*).
- b) Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang memiliki risiko bencana.
- c) Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan kompleks, beberapa potensi bencana tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi serta konflik sosial. Di Indonesia potensi bencana dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*), potensi bahaya utama (*main hazard potency*) antara lain pada peta rawan bencana gempa yang terjadi di Indonesia memiliki zona-zona gempa yang rawan, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan lain-lain (Perka BNPB No. 4, 2008).

2.2.1 Tsunami

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut, letusan gunung api bawah laut atau longsor di laut. Namun tidak semua fenomena tersebut dapat adalah adanya deformasi (perubahan bentuk yang berupa pengangkatan atau penurunan blok batuan yang terjadi secara tiba-tiba dalam skala yang luas) di bawah laut. Terdapat empat faktor pada gempa bumi yang dapat menimbulkan tsunami, yaitu:

- a) pusat gempa bumi terjadi di laut
- b) Gempa bumi memiliki magnitudo besar
- c) kedalaman gempa bumi dangkal
- d) terjadi deformasi vertikal pada lantai dasar laut.

Tsunami merupakan bencana dengan proses yang cepat. Tsunami dapat terjadi bersumber dari lokasi yang dekat (*near field*) dengan waktu penjarannya kurang dari 30 menit dari sumber ke garis pantai pantauan dan lokasi yang jauh (*far-field*) yang waktu penjaran ke wilayah pantai pantauan lebih lama dari 30 menit atau sumber tsunami memiliki jarak lebih jauh dari 1000 km. Karakteristik kejadian bencana tsunami di Indonesia umumnya bersifat lokal, dimana jarak sumber terjadinya tsunami relatif dekat sehingga hanya memiliki waktu yang singkat/ sedikit untuk melakukan upaya antisipasi atau evakuasi (Rampangilei Willem et al, 2016)

Tsunami adalah ombak yang sangat besar dapat menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar/ cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Tsunami sangat berbahaya karena bisa menyapu bersih permukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Tsunami yang besar mampu membunuh banyak manusia dan makhluk hidup yang terkena dampak tsunami. 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Data rekaman sejarah, beberapa tsunami dapat diakibatkan oleh adanya gunung meletus, misalnya ketika terjadi letusan Gunung Krakatau (Khambali, 2017). Kerusakan akibat gelombang tsunami paling parah terjadi pada daerah teluk, hal ini disebabkan

karena terjadinya penyempitan gerakan gelombang sehingga mempercepat gerakan gelombang tersebut untuk sampai ke daerah pesisir pantai (Naryanto, 2003). Salah satu bahaya alam yang dapat menimpa kawasan pantai adalah bencana tsunami, yaitu gelombang laut yang bergerak amat cepat dengan kekuatan yang sangat besar untuk menerjang kawasan pantai. Bencana tsunami relatif jarang terjadi jika dibandingkan bahaya alam lainnya, namun sekali terjadi bencana tsunami maka kerugian atau korban yang ditimbulkan seringkali jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan bencana alam lain (Rosyidie, 2004).

2.2.2 Ancaman Bencana Tsunami

Ancaman adalah kejadian-kejadian gejala alam atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial ekonomi atau kerusakan lingkungan (UNDP Panduan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas, 2012). Indeks ancaman bencana disusun berdasarkan dua komponen utama, yaitu kemungkinan terjadi suatu ancaman dan besaran dampak yang pernah tercatat untuk bencana yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa indeks ancaman bencana disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi pada suatu daerah. Tingkat ancaman tsunami adalah potensi timbulnya korban jiwa pada zona ketinggian tertentu pada suatu daerah akibat terjadinya tsunami (Perka BNPB No 2, 2012).

Dalam pembuatan peta ancaman bencana tsunami, panduan yang digunakan yaitu Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk membuat peta ancaman, maka diperlukan pembuatan peta genangan terlebih dahulu. Dasar dalam pembuatan peta genangan mengikuti alur yang ada pada (Panduan Nasional Risiko Bencana Tsunami, 2011) dimana sudah terdapat alur-alur yang jelas. Dengan menggunakan tinggi tsunami maksimum yang ada pada tabel referensi potensi kejadian dan genangan tsunami di Indonesia, serta data yang didapatkan dari histori tsunami yang pernah terjadi, maka peta genangan dapat dikerjakan. Penyusunan peta ancaman bencana tsunami memperhatikan komponen-komponen utama yang akan dipetakan dengan menggunakan perangkat GIS. Indeks

ancaman tsunami yang diukur berdasarkan nilai inundasi, berdasarkan nilai inundasi maka dapat diketahui ketinggian genangan dan luasan daerah yang terparap limpasan tsunami. Terdapat 3 (tiga) kelas indeks ancaman ancaman tsunami antara lain (Perka BNPB No 2, 2012).

TABEL 2.1
Komponen Indeks Ancaman Bencana Tsunami

Tinggi Genangan	Tingkat Ancaman
<i>Inundasi \leq 1 meter</i>	Rendah
<i>1 meter < Inundasi \leq 3 meter</i>	Sedang
<i>Inundasi \geq 3 meter</i>	Tinggi

Sumber : Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012

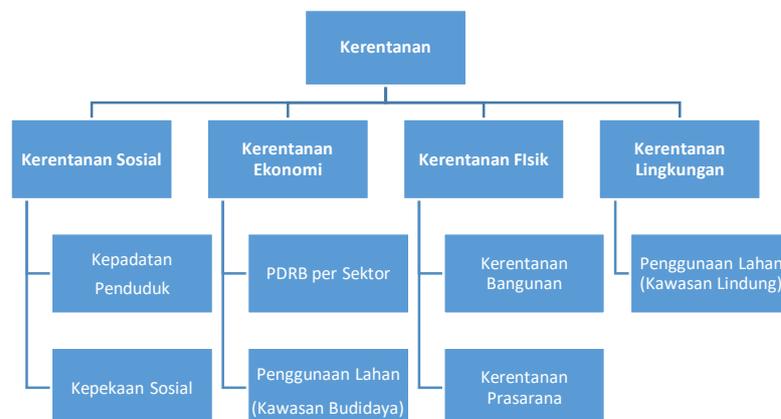
Bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 di garis pantai Selat Sunda, Indonesia, disebabkan oleh runtuhnya gunung Anak Krakatau. Bencana tsunami yang terjadi memiliki ketinggian genangan yang beragam, yaitu dipulau Sumatera \pm 4 meter, sedangkan dipulau Jawa \pm 10 meter (Takabatake, 2019). Kajian yang dilakukan menghasilkan peta analisis terhadap bahaya tsunami dengan menganalisa data yang berbentuk non numerik atau data-data yang tidak diterjemahkan dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan analisa deskriptif dan analisa *overlay* peta hasil digitasi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kecamatan Kalianda termasuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami khususnya di wilayah pesisir.

2.3 Kerentanan Bencana

Kerentanan (*vulnerability*) adalah seekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Kerentanan ditujukan pada upaya mengidentifikasi dampak terjadinya bencana berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam jangka pendek, terdiri dari hancurnya

pemukiman infrastruktur, sarana dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun kerugian ekonomi jangka panjang berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun kerusakan sumber daya alam lainnya (BAKORNAS PB, 2007).

Menurut Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan bencana dibagi ke dalam 4 jenis yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan. Kerentanan termasuk seperti kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah ekonomi (kerentanan ekonomi), struktur fisik (kerentanan fisik) dan wilayah lingkungan (kerentanan lingkungan). Setiap kerentanan memiliki perhitungan bobot nilai yang bervariasi per bencana (dan intensitas bencana). Indikator dalam analisis kerentanan ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Sumber : Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012

GAMBAR 2.2

Indikator Analisis Kerentanan

2.3.1 Kerentanan Sosial

Menurut Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, parameter yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur. Indeks kerentanan sosial diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk (60%), kelompok rentan (40%) yang terdiri dari rasio

jenis kelamin (10%), rasio kemiskinan (10%), rasio orang cacat (10%) dan kelompok umur (10%). Parameter kerentanan sosial terlampir pada lampiran IV.

2.3.2 Kerentanan Ekonomi

Menurut Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, parameter yang digunakan untuk kerentanan ekonomi adalah luas lahan produktif dalam rupiah (sawah, perkebunan, lahan pertanian dan tambak) dan PDRB. Luas lahan produktif dapat diperoleh dari peta guna lahan dan buku kabupaten atau kecamatan dalam angka yang dikonversi kedalam rupiah, sedangkan PDRB dapat diperoleh dari laporan sektor atau kabupaten dalam angka. Parameter kerentanan ekonomi terlampir pada lampiran IV.

2.3.3 Kerentanan Fisik

Menurut Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, parameter yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah kepadatan rumah, ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis. Kepadatan rumah didapatkan dari luas area terbangun dibagi berdasarkan luas wilayah (dalam ha) dan dikalikan dengan harga satuan dari masing-masing parameter. Parameter kerentanan fisik hampir sama untuk semua jenis ancaman, kecuali ancaman kekeringan yang tidak menggunakan kerentanan fisik. Parameter kerentanan fisik terlampir pada lampiran IV.

2.3.4 Kerentanan Lingkungan

Menurut Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, parameter yang digunakan untuk kerentanan lingkungan yaitu luas hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/ mangrove, rawa dan semak belukar. Parameter kerentanan fisik berbeda-beda untuk masing-masing jenis ancaman. Parameter kerentanan lingkungan tsunami terlampir pada lampiran IV.

2.3.5 Indeks Kerentanan

Menurut Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana, indeks kerentanan adalah hasil dari analisis kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan, dengan faktor-faktor pembobotan yang berbeda untuk masing-masing jenis ancaman. Semua faktor bobot yang digunakan untuk analisis kerentanan adalah hasil dari proses AHP. Parameter indeks kerentanan tsunami terlampir pada lampiran IV.

2.4 Pariwisata Tangguh Bencana dan Mitigasi Bencana

Daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi serta memiliki kerentanan yang tinggi tidak akan memberikan dampak besar jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (*disaster resilience*). Konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius yang datang. Sehingga meskipun daerah tersebut memiliki ancaman bencana yang besar jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup, maka efek bencana dapat di minimalisir (Buku Manajemen Penanggulangan Bencana, 2017). Beberapa kawasan wisata memiliki kerentanan dan ancaman yang tinggi, serta memiliki ketahanan yang rendah terhadap bencana alam karena belum mempunyai strategi dalam pengelolaan maupun mitigasi bencana. Peran pariwisata sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan menunjang perekonomian kawasan/ wilayah, sedangkan beberapa kawasan wisata terdapat pada kawasan yang rawan bencana, sehingga perlunya mitigasi bencana dalam meminimalisir dampak bencana, dan meningkatkan ketahanan/ ketangguhann terhadap bencana di kawasan wisata (Rosyidie, 2004).

Pengelola destinasi wisata yang mengandung risiko tinggi wajib memperhatikan keselamatan pengunjung dengan perencanaan dan pengendalian risiko, seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun, 2009 Pasal 26. Dalam upaya mewujudkan pariwisata tangguh bencana, perlu adanya perencanaan pariwisata menuju tangguh bencana dengan menerapkan mitigasi pada destinasi wisata. Kondisi demikian menunjukkan bahwa adanya mitigasi perlu untuk mewujudkan pariwisata tangguh bencana (Pahleviannur M

Rizal, 2019). Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008). Mitigasi merupakan serangkaian upaya pencegahan sebelum terjadinya bencana atau upaya pengurangan resiko. Mitigasi bencana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu mitigasi non struktural dan struktural. Adapun penjelasan mitigasi struktural dan non struktural sebagai berikut (Coppola, 2007, 179-185).

- a) Mitigasi struktural merupakan mitigasi yang memiliki wujud fisik seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur, berfokus pada tindakan pembangunan secara fisik, dengan menggunakan teknik khusus yang dapat berguna dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Mitigasi struktural lebih banyak memandang dan melakukan pertimbangan pada “manusia yang mengendalikan alam” ketika diterapkan pada bencana alam, tindakan struktural umumnya mahal dan termasuk berbagai macam peraturan, penyesuaian, paksaan, peninjauan, pemeliharaan, dan pembaharuan.
- b) Mitigasi non struktural merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas/ ketangguhan lembaga dan masyarakat, sehingga mampu untuk menyiapkan diri dan selalu waspada terhadap ancaman bencana yang akan datang. Mitigasi non struktural sering dianggap mekanisme dimana “manusia beradaptasi dengan alam”, mitigasi non struktural biasanya ditandai dengan melakukan perencanaan tata ruang dan wilayah, memberikan pendidikan mengenai kebencanaan, penyuluhan, pembuatan standard operating procedur (SOP), serta rencana rencana lainnya yang berkaitan dengan rencana tanggap darurat bencana.

Upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana, kegiatan mitigasi digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural berupa peraturan, penyuluhan dan pendidikan, serta bersifat struktural berupa bangunan dan prasarana (Perka BNPB No 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana).

2.5 Sintesa Literatur

Sintesa Literatur bersumber dari berbagai macam literatur dijadikan sebagai dasar peneliti dalam melakukan penelitian, pariwisata tangguh bencana di kawasan wisata pantai Kecamatan Kalianda. Sintesis literatur ini berfungsi untuk mendapatkan teori dari hasil yang akan diteliti saat melaksanakan kegiatan dilapangan. Berikut ini merupakan tabel hasil ringkasan literatur:

TABEL 2.2
Sintesis Literatur

Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Penelitian
Potensi kawasan pesisir, pengertian pariwisata, dan potensi pariwisata	Fauzy, 2009 dalam Dirgayusa, 2015	Kawasan pesisir dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Salah satu potensi kawasan pesisir, yaitu sebagai pengembangan kawasan pariwisata.	Karakteristik dan potensi pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda
	Undang-undang RI nomor 10 tentang Kepariwisataaan, 2009	Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.	
	Luturlean Bachruddin, 2019	Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dan bertujuan untuk berrekreasi atau memiliki suatu kepentingan sehingga keinginannya dapat terpenuhi.	
	Isdarmanto, 2017	Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap cukup prospektif dalam peningkatan ekonomi. Sektor ini diyakini tidak hanya sekadar mampu menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan, tetapi juga mampu mengentaskan kemiskinan.	
Pengertian Bencana, Bencana Alam, Tsunami, Potensi Bencana	UU tentang Penanggulangan Bencana No. 24, 2007	Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis.	Potensi bencana tsunami di kawasan pantai dan Kecamatan Kalianda serta di daerah teluk.
		Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.	

Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Penelitian
	Rosyidie, 2004	Salah satu bahaya alam yang dapat menimpa kawasan pantai adalah bencana tsunami, yaitu gelombang laut yang bergerak amat cepat dengan kekuatan yang sangat besar untuk menerjang kawasan pantai.	
	Perka BNPB Nomor 4, 2008	Tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi di laut, letusan gunung api bawah laut atau longsor di laut.	
	Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, 2012	Kecamatan Kalianda termasuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami khususnya di wilayah pesisir	
	Naryanto, 2003	Kerusakan akibat gelombang tsunami paling parah terjadi pada daerah teluk, hal ini disebabkan karena terjadinya penyempitan gerakan gelombang sehingga mempercepat gerakan gelombang tersebut untuk sampai ke daerah pesisir pantai.	
Menghitung ancaman bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Kalianda	Takabatake, 2019	Bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 di garis pantai Selat Sunda, Indonesia, disebabkan oleh runtuhnya gunung Anak Krakatau. Bencana tsunami yang terjadi memiliki ketinggian genangan yang beragam, yaitu dipulau Sumatera ± 4 meter, sedangkan dipulau Jawa ± 10 meter.	Sejarah ketinggian gelombang tsunami di Kab. Lampung Selatan ± 4 meter
	Panduan Nasional Risiko Bencana Tsunami, 2011	Dengan menggunakan tinggi tsunami maksimum yang ada pada tabel referensi potensi kejadian dan genangan tsunami di Indonesia, serta data yang didapatkan dari sejarah tsunami yang pernah terjadi, maka peta genangan dapat dikerjakan.	Indeks terpapar bencana tsunami dan Indeks ancaman bencana tsunami
	Perka BNPB Nomor 2, 2012	Indeks ancaman tsunami yang diukur berdasarkan nilai inundasi, berdasarkan nilai inundasi maka dapat diketahui ketinggian genangan dan luasan daerah yang terpapar limpasan tsunami.	
Menghitung kerentanan sosial, ekonomi, fisik, lingkungan, dan	BAKORNAS PB, 2007	Kerentanan adalah seekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.	Variable : 1. Kerentanan Sosial : kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio

Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Penelitian
indeks kerentanan tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Kalianda.	Perka BNPB Nomor 2, 2012	<p>Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan bencana dibagi ke dalam 4 jenis yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan lingkungan.</p>	<p>kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur 2. Kerentanan Ekonomi : luas lahan produktif, dan PDRB Variabel : 3. Kerentanan Fisik : kepadatan rumah, ketersediaan bangunan/fasilitas umum, dan ketersediaan fasilitas kritis 4. Kerentanan Lingkungan : penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/mangrove, rawa dan semak belukar). 5. Indeks kerentanan terhadap bencana tsunami</p>
		<p>Indeks kerentanan adalah hasil dari produk kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan, dengan faktor-faktor pembobotan yang berbeda untuk masing-masing jenis ancaman yang berbeda.</p>	
Pariwisata Tangguh Bencana	Khambali I, 2017	<p>Daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi serta memiliki kerentanan yang tinggi tidak akan memberikan dampak besar jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana.</p>	<p>Meminimalisir dampak bencana tsunami di pariwisata pantai Kecamatan Kalianda dengan mitigasi bencana (struktural dan non struktural)</p>
	Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Pasal 26, 2009	<p>Pengelola destinasi wisata yang mengandung risiko tinggi wajib memperhatikan keselamatan pengunjung dengan perencanaan dan pengendalian risiko.</p>	
	Rosyidie, 2004	<p>Peran pariwisata sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan menunjang perekonomian kawasan/ wilayah, sedangkan beberapa kawasan wisata terdapat pada kawasan yang rawan bencana, sehingga perlunya mitigasi bencana dalam meminimalisir dampak bencana, dan meningkatkan ketahanan/ ketangguhann terhadap bencana di kawasan wisata.</p>	

Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Penelitian
	Pahleviannur M Rizal, 2019	Dalam upaya mewujudkan pariwisata tangguh bencana, perlu adanya perencanaan pariwisata menuju tangguh bencana dengan menerapkan mitigasi pada destinasi wisata. Kondisi demikian menunjukkan bahwa adanya mitigasi perlu untuk mewujudkan pariwisata tangguh bencana.	
	Peraturan Pemerintah No 21, 2008	Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana.	
	Coppola, 2007	Mitigasi bencana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu mitigasi non struktural dan struktural.	
		Mitigasi struktural merupakan mitigasi yang memiliki wujud fisik seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Tindakan struktural umumnya mahal dan termasuk berbagai macam peraturan, penyesuaian, paksaan, peninjauan, pemeliharaan, dan pembaharuan.	
		Mitigasi non struktural merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat, sehingga pihak pihak tersebut mampu untuk menyiapkan diri dan selalu waspada terhadap ancaman bencana yang datang.	
	Perka BNPB Nomor 4, 2008	Mitigasi digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural berupa peraturan, penyuluhan dan pendidikan, serta bersifat struktural berupa bangunan dan prasarana.	

Sumber : Hasil analisis, 2019